

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu industri yang mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Hal ini terjadi karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tugas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada penjamin kemudian digunakan untuk aktivitas investasi sehingga aktivitas perekonomian masyarakat suatu negara dapat tumbuh dan berkembang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 perbankan merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan dan mengalirkan dana dalam bentuk kredit untuk menaikkan kehidupan masyarakat.

Menurut (Kasmir, 2020) dari segi fungsinya bank di terdiri atas 2 yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sama halnya menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bank mempunyai dua jenis yaitu Bank Sentral, Bank Umum Konvensional atau Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Fungsi dan peranan kedua bank tersebut sama yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menyalurkan dana merupakan membebaskan kembali dana simpanan tabungan, giro, deposit ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, bank umum merupakan bank yang memiliki kegiatan baik dalam perbankan konvensional maupun syariah.

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki fungsi yang sama dengan bank umum namun kegiatan usaha bank perkreditan rakyat lebih diperkecil dibandingkan bank umum karena Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak bisa menerima simpanan giro, valas dan asuransi.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Bank yang menghimpun dana dari masyarakat secara konvensional dalam bentuk simpanan berupa tabungan kredit dan deposito berjangka. Sama halnya dengan bank konvensional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga mempunyai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Perkreditan Syariah (BPRS) memiliki fungsi yaitu melaksanakan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah yang menetapkan sistem bagi hasil yaitu mudharabah, musyarakah, murahabah. Aktivitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak sama dengan bank konvensional karena Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh melakukan simpanan giro, valas, dan asuransi. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki keunggulan dari bank umum dimana bank perkreditan rakyat memiliki bunga yang relative besar dari bank umum. Tidak hanya itu, ada kalanya Bank Perkreditan Rakyat juga membebaskan biaya administrasi kepada nasabah dan juga diberikan fasilitas jasa petugas yang bersedia datang kerumah untuk melakukan penghimpunan dana.

Dalam pencatatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah ditahun 2021 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari 1.646 unit sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 165 unit yang telah tersebar di diseluruh penjuru daerah kecamatan yang ada di Indonesia. Peranan bank sebagai

lembaga penyimpan dana tidak luput dari sebuah risiko yang dihadapinya yakni risiko kredit. Dalam kegiatan usaha bank kredit merupakan kegiatan yang utama. Besarnya kredit yang disalurkan oleh bank maka bank akan mendapatkan keuntungan. Kerugian pun bisa terjadi jika kegagalan pengembalian dana kredit yang diberikan suatu bank lalu akan menjadi kredit bermasalah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan dan operasional bank. Jika terjadinya kredit bermasalah ini akan mengakibatkan dampak terhadap rasio *Non Performing Loan* (NPL) untuk mengukur bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian kredit.

Dilihat dari berita yang beredar salah satunya bisnis.com bahwa ada 12 bank BPR bangkrut di sepanjang tahun 2024. Hal ini menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan terbaru yakni nomor 9 tahun 2024 tentang tata kelola BPR dan BPRS salah satunya mengenai penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko, benturan kepentingan dan pelaporan system teknologi informasi. Dikutip dari artikel antaranews.com BPR Bali diingatkan OJK mengenai memperkuat modal untuk meningkatkan daya saing. Jika pada suatu bank terjadi *Non Performing Loan* (NPL) maka yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingginya terjadi kredit bermasalah tersebut maka bank harus memiliki kecukupan modal yang berfungsi untuk menghalangi terjadinya kredit bermasalah tersebut. Menurut Kasmir (2020) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan perbandingan rasio antara modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko sesuai ketentuan pemerintah. CAR juga digunakan sebagai kemampuan bank dalam mencukupi kebutuhan permodalan. Sesuai dengan

fungsinya CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan modal utama yang bisa dikelola jika terjadinya kerugian terhadap suatu bank. Besar atau kecilnya dana yang dimiliki bank dapat memberikan keuntungan dan meminimalisir risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 mewajibkan setiap bank menyediakan modal minimum untuk risiko yaitu 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu), 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua), 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga), 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5. Dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini bank dapat mengelola modal dengan mengembangkan usaha dan menjadikan modal tersebut sebagai landasan modal utama jika terjadinya *Non Performing Loan* (NPL).

Sebuah bank dapat berjalan lancar apabila aset yang dikelola memiliki kualitas bagus dan pertumbuhan naik. Tanpa adanya aset bank tidak dapat melakukan kegiatan operasional. Aset merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, aset tersebut nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 40 tahun 2019 Aset Bank terdiri dari aset produktif dan aset non produktif. Aset produktif merupakan aset yang menyediakan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk

penempatan, transaksi derivative, surat berharga, kredit, penyertaan modal dan transaksi rekening administrative. Sedangkan aset non produktif adalah aset bank yang memiliki potensi kerugian seperti agunan yang diambil alih, properti yang terbengkalai rekening antar kantor dan rekening tertunda.

Pada sebuah bank aset menjadi sangat penting jika aset dikelola dengan sebaik mungkin akan memberikan keuntungan bagi bank karena aset bisa menjadi sesuatu yang dapat menjalankan aliran dana, mengurangi pengeluaran atau meningkatkan penjualan. Pertumbuhan aset dapat dilihat dari tingkat perubahan tahunan dari total aktiva. Peningkatan ini diikuti dengan hasil peningkatan operasional dan akan menambah kepercayaan pihak luar terhadap sebuah bank. Berikut ini pertumbuhan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada 4 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatera Barat

2019	2020	2021	2022
1,835	1,902	1,985	2,041
*angka dalam miliar (Rp)			

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2019-2022

Dari tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan aset pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatera Barat dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan peningkatan yang terjadi disetiap tahun maka dapat dikatakan keuntungan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatera

Barat meningkat. Peningkatan aset tersebut menjadi dasar kepercayaan nasabah kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk melakukan transaksi simpanan tabungan maupun kredit. Sumber keuntungan dari sebuah bank tidak hanya aset saja namun Menurut Kasmir (2020) sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat disebut juga dana pihak ketiga karena dapat dilihat dari deposit dan tabungan nasabah.

Sumber dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana utama bagi kegiatan operasional suatu bank. Keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasi dari dana ini. Untuk memperoleh dana dari pihak ketiga Bank Perkreditan Rakyat ada dua macam jenis simpanan yaitu deposito dan tabungan nasabah. Berikut ini pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera Barat:

Tabel 1.2 Dana Pihak Ketiga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Sumatera Barat

TAHUN	2019	2020	2021	2022
%	1,39	1,39	1,32	1,26
Miliar (Rp)	1.425	1.475	1.545	1.594

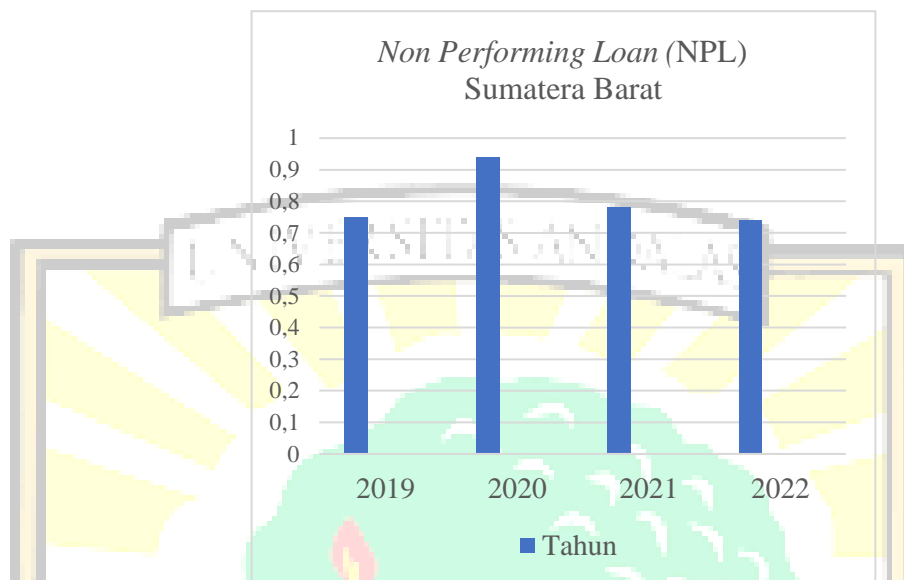
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia tahun 2019-2022

Dari tabel Statistik Perbankan Indonesia dapat dilihat dari tahun 2019 dana pihak ketiga mencapai 1,39% dan memperoleh dana pihak ketiga sebesar 1,425 Miliar. Jika perhatikan dari tahun mengalami peningkatan sebesar 0,26 menjadi 1,559 Miliar. Dengan kata lain kepercayaan masyarakat terhadap Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatera Barat meningkat karena masyarakat melakukan penyaluran dana simpan pinjam.

Dari fungsi bank dapat dilihat bahwa fungsi utama bank yaitu menghimpun dana masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan hidup masyarakat. Dengan memiliki fungsi ini perbankan pun memiliki risiko yang besar salah satunya risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Sebagai penyalur dana kepada masyarakat kredit merupakan salah satu kegiatan perbankan yang menjadi sumber pendapatan menguntungkan bagi sebuah bank karena pendapatan bunga terbesar dari sebuah penyaluran kredit. Kegiatan perkreditan paling menguntungkan bagi sebuah bank namun juga menjadi kerugian sebuah bank karena debitur juga tidak dapat mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 rasio *Non Performing Loan* (NPL) dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu jika rasio NPL < 2% dikategorikan sebagai NPL bank sangat sehat, jika NPL berada diantara 2-5% maka bank dapat dikategorikan sehat, apabila NPL > 5% maka bank dapat dikatakan tidak sehat.

**Grafik 1.1 Non Performing Loan Bank Perkreditan Rakyat
di Sumatera Barat**



Sumber: *Statistik Perbankan Indonesia 2019-2022*

Dapat dilihat dari grafik diatas rasio NPL dari tahun 2019 *Non Performing Loan* (NPL) berada diatas 0,05 yaitu 0,08. Pada tabel grafik *Non Performing Loan* di Sumatera Barat melewati 0,05 dengan kisaran 0,07 sampai 0,09 artinya kredit yang ada di Sumatera Barat kurang sehat dan kurang lancar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat menyatakan bahwa data dua tahun terakhir hingga sampai saat ini jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar diseluruh wilayah Sumatera Barat sebanyak 64 cabang. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di wilayah Sumatera Barat sebanyak 10 cabang. Dengan adanya Bank Perkreditan Raykat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ini memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi simpan pinjam dan permodalan usaha sampai ke pelosok negeri.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya untuk penyimpanan dana nasabah saja akan tetapi BPR juga memberikan kredit kepada nasabah. Dalam wawancara Firmansyah (2018) artikel republika.co.id penyaluran dana kredit kepada nasabah di Sumatera Barat bisa dikatakan cukup tinggi pada tahun 2018. OJK Sumatera Barat mengungkapkan bahwa BPR diposisi penyaluran kredit kepada nasabah mendapatkan peringkat ke 11 tingkat nasional. Walaupun menduduki peringkat 11 secara nasional tingkat kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera Barat. Dilihat dari data perkembangan NPL yang ada di Sumatera Barat kenaikan NPL terjadi secara signifikan bahkan melampaui dari ketentuan OJK yaitu di bawah 5%. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan perbankan BPR di Sumatera Barat tidak sehat. NPL ini sangat mempengaruhi perbankan dengan nilai kredit yang cukup tinggi ini, Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat memerintahkan Bank Perkreditan Rakyat mencari solusi untuk menuntaskan masalah apa yang mengakibatkan tingginya kredit bermasalah di BPR Sumatera Barat.

Loan Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka (deposite) yang mana dana tersebut di berikan kepada pihak ketiga yang dikumpulkan dari masyarakat. *Loan Deposit Ratio* ini menjadi pedoman dalam menilai Kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dalam mempertahankan dan menadapatkan nasabah. Dari ratio ini bisa dilihat seberapa besar dana pihak ketiga yang digunakan untuk modal asset yang tidak likuid seperti kredit. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing *Loan Deposit Ratio* (LDR) merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing. Menurut penelitian Barus & Erick (2016) *Loan Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

Menurut Yulianto, Yusniar (2020) tingginya kemajuan dana sebuah bank dapat berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit sebuah bank. CASA (*Current Account Saving Account*) merupakan dana simpanan masyarakat yang dalam bentuk tabungan dan giro tidak termasuk deposito. Jika semakin banyak dana simpanan dan giro sebuah bank maka semakin tinggi volume penyaluran kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Apabila simpanan stabil maka rasio CASA tinggi dan bank dapat menyediakan dana untuk melakukan penyaluran kredit kepada nasabah.

Tidak hanya faktor internal saja yang mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) tapi ada faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Lassoued (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah memiliki pengaruh negatif terhadap NPL bank, baik pada kondisi ekonomi stabil maupun krisis. Hasil ini sesuai dengan jurnal Sudana, Aisyah (2018) bahwa hasil penelitian dan Ghosh (2015), Chaibi dan Ftiti (2015) serta Louzis et al (2012) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL.

Kondisi ekonomi masyarakat akan mempengaruhi permintaan kredit dan jumlah simpanan. Jika pendapatan dalam suatu wilayah atau daerah menjadi turun, bisa mengakibatkan pembayaran kredit menjadi bermasalah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh produksi dalam suatu wilayah dalam satu tahun. Sebaliknya jika PDRB suatu wilayah meningkat maka pembayaran kredit tidak akan mengalami masalah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan presentasi kenaikan pendapatan nasional.

Kredit merupakan suatu hal yang wajar didalam kehidupan masyarakat. Dengan melakukan pinjaman uang ke bank, masyarakat bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu dengan melakukan pinjaman atau kredit masyarakat juga bisa membangun bisnis untuk keperluan produksi. Dalam penelitian Zamri et al (2019) terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) pada daerah Nusa Tenggara Barat pertumbuhan penduduk, pendidikan nasabah, kondisi nasabah dan penghasilan nasabah. Dalam penelitian tersebut faktor eksternal memberikan dampak yang signifikan terhadap non performing loan yang mengakibatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat terganggu.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Loan Deposit Ratio (LDR), CASA, Pertumbuhan Ekonomi pada provinsi Sumatera Barat dan Demografi Daerah terhadap Non Performing Loan (NPL) di Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah (LDR) *Loan Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*?
2. Apakah CASA (*Current Account Saving Account*) berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*?
4. Apakah Demografi Daerah berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh (LDR) *Loan Deposit Ratio* terhadap risiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Barat.
2. Menganalisis pengaruh CASA (*Current Account Saving Account*), terhadap risiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Barat.
3. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat terhadap risiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia
4. Menganalisis Demografi Daerah terhadap risiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkatkan kinerja bank, terutama pada pemberian kredit kepada nasabah menjadi kredit yang berkualitas. Selain itu manfaat untuk masyarakat yaitu mengetahui perkembangan dan memberikan informasi terkait pertumbuhan *Non Performing Loan* (NPL). Sedangkan untuk peneliti hasil penelitian ini sebagai pembanding riset penelitian sebelumnya dan menjadi acuan untuk riset penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian yaitu:

1. Meneliti pengaruh *Loan Deposit Ratio* (LDR), CASA (*Current Account Saving Account*), pertumbuhan ekonomi, Demografi terhadap *Non Performing Loan* (NPL)
2. Yang menjadi objek penelitian adalah Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera Barat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2022

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis terdiri dari bab yang telah tergabung dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisikan tinjauan pustaka tentang teori-teori dan konsep yang dapat memperkuat penelitian ini, pada bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, mengembangkan hipotesis yang akan digunakan, serta model kerangka konseptual yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam tahap pengolahan data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini yang dibahas adalah tentang ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, operasional variable dan pengukuran variable, populasi dan sampel penelitian, Teknik analisis data, pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan data dan hasil penelitian pengaruh LDR (*Loan Deposit Ratio*), CASA (*Current Account Saving Account*), Pertumbuhan Ekonomi dan Demografi Daerah terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, implikasi dari hasil penelitian dan keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan.

